

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2018

Adiyatma Admaja, Debi Anggraini, Margaretha Larasati,  
Novita Dwi Cahyanti, Mohammad Wasil



Adiyatma Admaja<sup>1</sup>, Debi Anggraini<sup>2</sup>, Margaretha Larasati<sup>3</sup>, Novita Dwi Cahyanti<sup>4</sup>, Mohammad Wasil<sup>5</sup>;  
<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran, Jawa Timur, <sup>5</sup>Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, Jawa Timur.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2021-05-19

Received in revised form 2021-05-21

Accepted 2021-06-17

#### Kata kunci:

Kinerja Keuangan Daerah,  
Rasio Keuangan, Otonomi  
Daerah

#### Keywords:

Regional Financial  
Performance, Financial  
Ratios, Regional Autonomy

#### How to cite item:

Adiyatma Admaja, Debi  
Anggraini, Margaretha  
Larasati, Novita Dwi  
Cahyanti, Mohammad  
Wasil. (2021). Analisis  
Kinerja Keuangan Daerah  
Pemerintah Kabupaten  
Tulungagung Periode  
2014-2018.  
*Journal of Regional  
Economics Indonesia*, 2(2).

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari aspek keuangan daerah tahun anggaran 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang dipergunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Sedangkan data penelitian merupakan data keuangan realisasi anggaran Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahun 2014 pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan proses desentralisasi daerah sebesar 13,2% dengan sisa 86,8% yang menunjukkan pemerintah masih belum maksimal dalam menjalankan proses desentralisasi daerah, begitu pula dengan tahun lainnya. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan pemerintah provinsi masih sangat mendominasi dalam pendanaan. Tingkat kemandirian pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan masih dibutuhkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai akses dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah.

The purpose of this study was to determine the performance of the local government of Tulungagung Regency in terms of the regional financial aspects of the 2014-2018 fiscal year. This study uses quantitative analysis methods used to measure financial performance by using financial ratios. Meanwhile, the research data is the budget realization data for Tulungagung Regency. Based on the results of the study, it is known that in 2014 the government of Tulungagung Regency in carrying out the regional decentralization process was 13.2% with the remaining 86.8% which showed that the government was still not optimal in carrying out the regional decentralization process, as well as in other years. The level of local government finances tends to decline from year to year. This shows that the provincial government still dominates in terms of resources. The level of local government independence shows that the central government has a dominant role compared to the independence of local governments, so that it can be interpreted that efficiency and effectiveness in the implementation of regional autonomy are still needed. It is hoped that local governments can use the results of this research as access to local financial performance

## 1. Pendahuluan

Kinerja pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik tercerminkan dari penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan landasan hukum peraturan otonomi daerah dengan mengubah kewenangan pengelolaan yang diberikan pada tiap daerah-daerah otonom, yang termuat pada TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Peraturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Indonesia.” Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berisi tentang pemerintahan daerah serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi daerah diwujudkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, dengan diserahkannya urusan tugas serta wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan memegang teguh pedoman yang tertera pada peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dalam urusan keuangannya sehingga tidak terlalu bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat. Pelaksanaannya pun dilakukan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasar atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata ada serta berpotensi untuk berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas yang dimiliki daerah. Kemudian dalam penyelenggaraannya haruslah sejalan dengan tujuan dari pemberian otonomi daerah yakni memberdayakan daerah untuk mensejahterakan rakyat sebagai bentuk pencapaian tujuan nasional (Machmud, Kawung & Rompas, 2014). Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud ialah besaran tingkat kemandirian pemerintah dalam hal mendanai segala aktivitasnya, menurut Hadi dalam (Imawan & Wahyudin, 2014).

Maka dari itu diperlukannya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam mengelola dana APBD harus dilakukan secara

transparan, efisien, serta efektif. Berkaitan dengan hal pengelolaan keuangan daerah, maka analisis terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung dapat memberikan informasi penting guna menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta dapat digunakan untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Imawan & Wahyudin (2014) menyatakan bahwa alat ukur yang dapat digunakan dalam analisis kinerja keuangan daerah yakni dengan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kemudian kemampuan mengelola keuangan suatu daerah dapat terlihat dari Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara langsung ataupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah mendanai tiap aktivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial masyarakat. Dari keterangan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengelola keuangan daerahnya pada tahun 2014-2018.

---

## **2. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sistem pengelolaan keuangan daerah berhubungan dengan akuntansi keuangan daerah. Secara terminologi, akuntansi merupakan sebuah pengelompokan, pencatatan, serta mengikhtisarkan berdasarkan cara yang berarti dinyatakan dalam bentuk nilai uang dan semua transaksi maupun kejadian yang sedikit-sedikit bersifat financial dan dari catatan tersebut diperoleh tafsiran hasil. Menurut Elim (2014), akuntansi ialah sebuah sistem informasi yang dapat memberikan sebuah hasil laporan kepada pihak yang memiliki kepentingan akan aktivitas ekonomi serta kondisi dari suatu perusahaan.

Akuntansi sektor swasta berbeda dengan akuntansi pada sektor publik. Perbedaan karakteristik kedua jenis tersebut disebabkan oleh perbedaan suatu lingkungan atau daerah yang mempengaruhi. Menurut Mardiasmo (2009), organisasi sektor publik bergerak di dalam lingkungan yang sangat kompleks. Organisasi sektor publik dipengaruhi oleh komponen lingkungan yang terdiri dari faktor kultur, faktor ekonomi, faktor politik, dan juga faktor demografi. Dalam hal ini, dibutuhkan

penguatan pengukuran kinerja sektor publik. Kinerja dapat diketahui apabila individu sudah menetapkan kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan berupa tujuan atau bahkan target yang akan dicapai. Tanpa adanya sebuah tujuan dan target maka kinerja dari organisasi tidak dapat diketahui sebab dan tidak terdapat tolak ukur (Mahsun, 2013). Dalam konteks keuangan daerah, pengukuran kinerja dilihat dari rasio keuangan sebagai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Mahmudi (2010) menyatakan analisis rasio keuangan daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu: (i) derajat desentralisasi; (ii) rasio ketergantungan keuangan daerah; dan (iii) rasio kemandirian daerah. Ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi}} \times 100\%$$

---

### 3. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan daerah memiliki sebuah tujuan pokok yaitu untuk memberikan sebuah motivasi kepada daerah dalam mencapai suatu tujuan pemerintahan daerah serta untuk dapat memenuhi standar pelayanan publik yang sudah ditentukan sebelumnya sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan. Tujuan umum penilaian kinerja keuangan daerah terdiri dari tiga cakupan yaitu : (i) untuk dapat membahas strategi yang lebih tentang efisiensi keuangan daerah; (ii) digunakan untuk mengukur sebuah kinerja non finansial serta kinerja finansial secara tertimbang sehingga dapat diketahui perkembangan dari pencapaian strategi; dan (iii) digunakan sebagai alat untuk memperoleh pencapaian kepuasan berdasarkan kemampuan kolektif yang rasional.

Selain itu, penilaian kinerja keuangan sektor publik pada dasarnya dilakukan untuk dapat memenuhi tiga tujuan (Pramono, 2014), yang terdiri dari: (i) membantu dalam memperbaiki suatu kinerja pemerintahan; (ii) digunakan untuk mengalokasikan sumber daya serta pembuatan sebuah keputusan; dan (iii) digunakan dalam mewujudkan sebuah pertanggungjawaban publik serta memperbaiki sebuah komunikasi di dalam suatu lembaga.

Menurut Pramono (2014), manfaat dari penilaian kinerja keuangan daerah adalah: (i) dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai suatu ukuran yang dapat digunakan dalam menilai kinerja manajemen keuangan daerah; (ii) dapat memberikan arahan dalam pencapaian sebuah target kinerja keuangan daerah yang sudah ditentukan; (iii) dapat mengevaluasi sebuah kinerja keuangan daerah dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dan skema dari kinerja; (iv) dapat menyelesaikan masalah efisiensi tata kelola keuangan daerah yang ada dan dapat mengungkap sebuah permasalahan; (v) dapat membantu memahami proses kegiatan-kegiatan yang ada pada instansi pemerintah daerah; dan (vi) dapat memberikan sebuah kepastian mengenai pengambilan keputusan pelayanan publik yang dilakukan secara objektif.

Dengan adanya karakteristik serta sifat yang unik, maka Elim (2014) menyatakan bahwa organisasi sektor publik membutuhkan lebih luas sebuah ukuran penilaian kinerja, bukan hanya tingkat efisiensi, bukan hanya tingkat laba, dan juga bukan hanya ukuran finansial. Aspek - aspek di dalam pengukuran kinerja sektor publik, terutama keuangan daerah terdiri dari: (i) input; (ii) sebuah proses; (iii) output; (iv) outcome; (v) benefit; dan (vi) impact.

---

#### **4. Metode Penelitian**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi - instansi terkait, diantaranya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB). Uraian data mencakup gambaran umum Kabupaten Tulungagung serta laporan realisasi anggaran Kabupaten Tulungagung pada tahun 2014-2018. Hasil penelitian sekunder diperkuat dengan studi kepustakaan, dimana peneliti mempelajari konsep dan teori yang berhubungan dengan permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini. Studi kepustakaan penting dilakukan untuk mempertajam hasil analisis, serta memperkaya deskripsi pengolahan data. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan penelitian. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

## 5. Hasil dan Pembahasan

### a. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Daerah

Dalam mengukur kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung, data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014-2018. Laporan tersebut terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan Pendapatan Daerah. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat menggunakan perhitungan rasio keuangan.

**Tabel 01. Gambaran Besaran Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung (Rp. Juta)**

Rasio Keuangan	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	276.578	309.646	342.577	503.103	453.127
Pendapatan Transfer	1.837.980	2.060.091	2.227.708	2.084.001	2.156.284
Transfer Pemerintah Pusat	1.228.749	1.281.703	1.726.713	1.594.108	1.701.678
Transfer Pemerintah Provinsi	129.038	122.118	134.852	162.334	159.999
Total Pendapatan Daerah	2.114.558	2.369.737	2.570.286	2.598.104	2.701.521
Total Belanja	2.046.805	2.317.348	2.606.291	2.576.151	2.576.191

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung

Pada Tabel 01 dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 dengan kenaikan sebesar 4,7% dan mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar -9,3%. Untuk Pendapatan Transfer mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar -10,1%, namun di tahun lainnya cenderung meningkat. Peningkatan di tiap tahun terjadi pada Total Pendapatan Daerah, yang bisa dilihat dari kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 8,5%.

Berdasarkan hasil dalam Tabel 01, maka dapat dihitung masing-masing kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung, baik pada derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian daerah. Pertama adalah derajat desentralisasi, dimana hasil perhitungan menunjukkan kondisi sebagai berikut:

**Tabel 02. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi**

Rasio Keuangan	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Derajat Desentralisasi	13,2%	13,1%	13,3%	19,4%	16,8%

Sumber: Hasil Pengolahan

Dapat dilihat pada hasil perhitungan bahwa kinerja keuangan dengan derajat desentralisasi dari tahun 2014 sampai dengan 2017 cenderung meningkat. Namun pada 2018 derajat desentralisasi menurun sebesar 2,6% dari tahun 2017. Meskipun trend tersebut cenderung meningkat, namun derajat desentralisasi Kabupaten Tulungagung masih terbilang rendah.

Kedua adalah rasio ketergantungan keuangan daerah, dimana hasilnya menunjukkan kondisi sebagai berikut:

**Tabel 03. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio Keuangan	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	86,9%	86,9%	86,7%	80,2%	79,8%

Sumber: Hasil Pengolahan

Dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi masih terbilang tinggi meskipun pada 2017 dan 2018 mengalami penurunan sebesar 6,5% dan 0,4%.

Ketiga adalah rasio kemandirian daerah, dimana untuk tingkat kemandirian Kabupaten Tulungagung sendiri masih terbilang rendah mengingat rasio kemandiriannya berada di bawah 50%.

**Tabel 04. Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah**

Rasio Keuangan	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Kemandirian Daerah	20,4%	22,1%	18,4%	28,6%	24,3%

Sumber: Hasil Pengolahan

#### **b. Pembahasan**

Pengertian dari derajat desentralisasi yaitu kemampuan pemerintah daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui derajat kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 05. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi**

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Derajat Desentralisasi
0-10%	Sangat Kurang
10,1%-20%	Kurang
20,1%-30%	Sedang
30,1%-40%	Cukup
40,1%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Ernawati (2019)

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan proses desentralisasi daerah sebesar 13,2% dengan sisa 86,8%, yang artinya pemerintah Kabupaten Tulungagung masih belum maksimal dalam

menjalankan proses desentralisasi daerah. Begitu pun dengan tahun-tahun lainnya yang masih terbilang rendah. Pada tahun 2015 proses desentralisasi daerah dijalankan sebesar 13,1%, tahun 2016 sebesar 13,3%, tahun 2017 sebesar 19,4% dan tahun 2018 sebesar 16,8%. Meskipun di tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan, namun ini masih terbilang rendah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya yang nantinya digunakan untuk mendukung proses peningkatan PAD sehingga berdampak pada berkurangnya tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kriteria untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 06. Kriteria Penilaian Ketergantungan Daerah**

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0-10%	Sangat Rendah
10,1%-20%	Rendah
20,1%-30%	Sedang
30,1%-40%	Cukup
40,1%-50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: Ernawati (2019)

Dari hasil perhitungan sebelumnya, didapatkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tulungagung dari tahun 2014 hingga 2018 cenderung menurun. Pada tahun 2014 tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 86,9% dan masih bertahan hingga tahun 2015. Kemudian untuk tahun 2016 persentase ketergantungan menurun menjadi 86,7%, tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 6,5% menjadi sebesar 80,2% dan untuk tahun 2018 sebesar 79,8%. Meskipun tren ketergantungan keuangan daerah ini cenderung menurun setiap tahunnya, namun angka ini masih terbilang sangat tinggi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi masih sangat penting dan mendominasi dalam hal pendanaan.

Kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang dikatakan mandiri dalam aspek keuangan nantinya diharapkan dapat melaksanakan pembangunan dan juga pelayanan masyarakat tanpa mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sebagai pedoman dalam penilaian pola hubungan dengan kemampuan daerah dalam aspek keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 07. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Tingkat Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Ernawati (2019)

Pada hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sebesar 20,4%, tahun 2015 sebesar 22,1%, tahun 2016 sebesar 18,4% dan 2018 sebesar 24,3%. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti pemerintah pusat memiliki peranan yang lebih dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah atau dapat diartikan juga daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan untuk tahun 2017 tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung lebih tinggi dibanding tahun-tahun yang lainnya yaitu sebesar 28,6%. Dengan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung memiliki kemampuan keuangan yang rendah meskipun lebih tinggi dari tahun-tahun yang lain dan termasuk pola hubungannya bersifat konsultatif. Hal ini dapat diartikan campur tangan pemerintah pusat berkurang sedikit karena Kabupaten Tulungagung dirasa sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

---

## 6. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tahun 2014 pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan proses desentralisasi daerah kinerjanya sebesar 13,2% dengan sisa 86,8% yang menunjukkan pemerintah masih belum maksimal dalam menjalankan proses desentralisasi daerah begitu pula dengan tahun lainnya. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah cenderung menurun dari tahun 2014 dan 2015 sebesar 86,9%, selanjutnya tahun 2016 sebesar 86,7% sedangkan tahun 2017 sebesar 80,2% dan di tahun 2018 sebesar 79,8%. Hal ini menunjukkan pemerintah provinsi masih sangat mendominasi dalam pendanaan daerah di Kabupaten Tulungagung. Tingkat kemandirian menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah, sehingga kondisi tersebut dapat diartikan pemerintah daerah masih perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

---

## Daftar Pustaka

- Elim, P. 2014. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota kotamobagu. *Jurnal EMBA*, Vol. 2, No. 2, pp. 1521-1527.
- Ernawati, P. 2019. Kontribusi komponen pendapatan asli daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) (Studi Kasus pada Kabupaten Sleman Tahun 2011- 2017) (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- Imawan, R. and Wahyudin, A. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012', *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, No. 2, pp. 147-155. doi: 10.15294/aaj.v3i2.4176.
- Machmud, M., Kawung, G. and Rompas, W. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 14, No. 2, pp. 1-13.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahsun. Muhamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. 2014. Analisis kinerja

keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 2.

Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, Vol. 7, No. 13, pp. 83-112.